

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH  
MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA OBEN  
KABUPATEN KUPANG**

**Jennifer I. R. Dhue<sup>1</sup>, Frans B. Tokan<sup>2</sup>**  
**Prodi Ilmu Pemerintahan Unika Widya Mandira, Kupang**

***Abstrak***

*Penguatan kapasitas pemerintah dalam merencanakan pembangunan merupakan hal urgen yang mesti dibenahi, agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan desa yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar kapasitas organisasi desa merencanakan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat desa. Berbasis pada teori pengembangan kapasitas dan perencanaan partisipatif serta dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas ekstraksi yang dimiliki pemerintah desa hanya mampu memanfaatkan aset-aset publik desa yang ada di desa sesuai dengan kebutuhan pelayanan administrasi desa semata. Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif, pemerintah desa ternyata kurang mampu merespon berbagai aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan kapasitas jaringan dan kerjasama masih terbatas hanya pada kegiatan KKN mahasiswa tanpa kerjasama lain yang dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan.*

*Oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa dan masyarakat sehingga mampu membuat perencanaan yang lebih berkualitas merespon kepentingan mayoritas masyarakat desa dan lebih mampu bersinergi dengan berbagai lingkungan eksternal.*

*Kata Kunci : Kapasitas, Kualitas Perencanaan Pembangunan*

***Abstract***

*Strengthening government capacity in planning development is an urgent matter that must be addressed, in order to produce village development plans that are of higher quality and on target. This study aims to describe the capacity of village organizations to plan village development according to the needs and desires of the village community. Based on the theory of capacity building and participatory planning as well as using descriptive qualitative methods are expected to answer the objectives of this research.*

*The results showed that the extraction capacity of the village government was only able to utilize village public assets in the village in accordance with the needs of village administration services alone. Likewise with responsive capacity, the village government is apparently less able to respond to various community aspirations through development*

*planning to meet the needs of the village community. Meanwhile, the capacity of network and cooperation is still limited only to student KKN activities without other collaborations that are carried out in a programmed and sustainable manner.*

*Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the village government and the community so that they are able to make better quality plans that respond to the interests of the majority of the village community and are better able to synergize with various external environments.*

*Keywords: Capacity, Quality of Development Planning*

## I. PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat substantif bagi suatu organisasi dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Sebab melalui suatu perencanaan yang baik dan benar akan membantu pimpinan mewujudkan tujuan organisasi yang dikehendakinya. Suatu perencanaan pembangunan akan terlaksana dan tepat sasaran, bila dalam proses perencanaan telah melibatkan semua elemen sosial terutama kelompok masyarakat desa yang menjadi sasaran sehingga hasilnya benar-benar memberikan mafaat bagi kehidupan masyarakat desa. Tentu hal ini tidak serta merta dapat terealisasi kalau tidak didukung oleh sumberdaya organisasi desa yang memadai.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, setidaknya masyarakat desa mutlak diikutsertakan secara langsung dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Melalui implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan mayoritas warga desa mampu menggali dan menemukan berbagai potensi desa yang selama ini belum dikembangkan secara efektif bagi kemajuan desa. Sebab pengembangan potensi desa secara optimal diyakini dapat menjadi solusi dalam memecahkan masalah masyarakat desa. Itu sebabnya kapasitas pemerintah desa sangat dibutuhkan agar mampu mendisain sebuah kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih komprehensif dan partisipatif guna menjawab berbagai kebutuhan dan masalah masyarakat desa.

Dengan demikian pengetahuan tentang konsep perencanaan pembangunan desa yang baik mestinya menjadi hal yang niscaya dari kepala desa dan semua perangkat desa. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan desa berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat desa.

Dengan semakin meningkatnya bobot perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa maka akan berimplikasi positif pada perubahan kehidupan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan yang didesain oleh pemerintah desa bila melalui mekanisme yang benar dalam forum musrenbangdes, diyakini secara substantif akan menjawab dan memenuhi kehendak mayoritas warga desa. Penguatan kapasitas pemerintah desa juga terkait dengan penyediaan dan akses informasi yang memadai bagi perangkat

desa sebagai titik awal pengembangan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembangunan dalam konteks desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Itu sebabnya kapasitas pemerintah desa dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perencanaan pembangunan agar dapat berhasil dengan baik. Atau dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan desa sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna mulai dari proses penggalan masalah, penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalannya secara berkelanjutan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26, disebutkan bahwa Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan undang-undang tersebut jelas diamanatkan kepada kepala desa untuk menyelenggarakan pembangunan desa. Tentunya sejumlah tugas berat yang diperankan pemerintah desa mesti didukung oleh kapasitas yang mumpuni dari kepala desa dan para pembantunya.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa hanya bisa berhasil jika melibatkan peran serta banyak pihak khususnya Kepala desa bersama Perangkat desa sebagai penggerak pembangunan desa, masyarakat desa dan BPD sebagai pegawai kinerja kepala desa. Oleh karena itu sejak dari awal perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi mestinya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif. Hal itu dimaksudkan agar penentuan skala prioritas program pembangunan tidak berdasarkan pada kehendak segelintir orang saja, melainkan kehendak dan tanggungjawab bersama warga. Sehingga hasil pembangunan yang dicapai benar-benar dapat menyentuh kepentingan masyarakat secara luas.

Hasil studi awal diketahui bahwa sejumlah perencanaan pembangunan masih jauh dari kehendak masyarakat dan cenderung bias gender, hal itu diduga karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia di dalam organisasi pemerintah desa, sehingga sejumlah rencana dan program pembangunan yang dihasilkan kurang tepat sasaran, seperti masih banyak rumah tangga yang belum menikmati air bersih, juga

minimnya program pembangunan bidang pemberdayaan yang dirasakan manfaatnya oleh mayoritas masyarakat desa terutama kelompok perempuan dan anak-anak. Karena itu pelibatan semua elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan dalam forum musyawarah desa dan musrenbangdes menjadi hal yang niscaya.

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar kapasitas pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang partisipatif sesuai kehendak warga desa.

## **II. TINJAUAN TEORITIK**

### **2.1. Pengertian Kapasitas**

Kapasitas merupakan suatu konsep yang sangat teknis dan telah lama dikenal dalam praktik organisasi pemerintah. Secara umum kapasitas organisasi desa di hampir semua desa di Indonesia relatif rendah dan belum mendapatkan perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah supra desa.

Karena itu langkah dan tindakan inovatif diperlukan untuk melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa agar masalah perencanaan pembangunan desa yang selama ini menjadi hambatan pembangunan desa dapat teratasi. Itu berarti pembangunan infrastruktur desa yang selama ini menjadi fokus pembangunan desa hendaknya mulai bergeser pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara umum, termasuk pengembangan kapasitas individu dan organisasi pemerintah desa. Tentu melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan desa yang lebih menitik beratkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa

Menurut GTZ dan USAID, kapasitas sering dipahami sebagai kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien, (Rozaki, dkk, 2005:108). Sehubungan dengan itu Milen, (2001) menegaskan bahwa kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individual, organisasi dan sistem untuk menggerakkan dan mewujudkan fungsi-fungsinya secara efektif dan berkelanjutan. Itu berarti kapasitas tidak hanya dipandang dari sudut pandang yang statis tetapi juga memiliki makna dinamis yang terus mengalami perubahan dan adaptasi berdasarkan tuntutan perubahan yang makin cepat dan variatif. Itu sebabnya David Korten dalam Keban (2008:199) mengatakan

bahwa semua upaya pembangunan hendaknya menyentuh aspek-aspek manusia, membuat manusia menjadi subyek pembangunan yang tangguh dan berkualitas.

Oleh karena itu strategi yang dapat dilakukan guna mencapai hal itu adalah melalui *capacity building*, yakni meningkatkan kemampuan SDM, kelembagaan dan jaringan. Apabila suatu pemerintahan mau dikembangkan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat, maka setidaknya dibenahi terlebih dahulu kapasitas kelembagaan, *networking* dan yang paling utama adalah SDMnya. Karena secara komprehensif kekuatan manusia sesungguhnya menjadi mesin penggerak utama untuk menstimulasi pengembangan aspek lainnya.

Dengan demikian kapasitas SDM diharapkan akan memainkan peran kunci dalam proses pembangunan jejaring kemitraan, kelembagaan dan sistem pengendalian pada semua sumber daya organisasi yang dimiliki untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang efektif bagi peningkatan kemandirian dan kemakmuran masyarakat desa. Sedangkan Handoko, dalam Sulistiyani, (2004:47) strategi pengembangan sumberdaya manusia harus difokuskan untuk mengembangkan kemampuan pembelajaran yang kontinyu, karena dinamisasi perubahan lingkungan internal maupun eksternal semakin menuntut kemampuan intelektual untuk menghasilkan pengetahuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa lingkungan internal organisasi tidak saja meliputi kondisi fisik yang sifatnya kasat mata, melainkan hal-hal yang tidak secara eksplisit terlihat, akan tetapi juga mempengaruhi kondisi lingkungan internal, seperti budaya kerja, kebiasaan-kebiasaan pegawai, perilaku organisasi, intensitas pertemuan, dan lain-lain. Dengan demikian menurut Sulistiyani (2004:48) salah satu pengembangan SDM yang dapat dilakukan adalah menciptakan kondisi kerja yang demokratis dan mendorong kreativitas individu melalui kegiatan pemberdayaan berupa pemberian wewenang, kekuasaan dan fasilitas untuk mengambil keputusan sendiri.

Menurut A.Fiszbein dalam Keban (2008), peningkatan kemampuan selalu berhubungan dengan; (1) Kemampuan tenaga kerja (*labour*), (2) Kemampuan teknologi yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau kelembagaan, (3) Kemampuan "*capital*" yang diwujudkan dalam bentuk dukungan sumber daya, sarana, dan prasarana. Sementara itu D.Eade dalam Keban (2008) juga menegaskan pentingnya

peningkatan kemampuan dalam tiga dimensi yaitu: (1) Individu, (2) Organisasi, dan (3) *Network*. Secara teoritik pengembangan dimensi individu dan organisasi merupakan kunci utama atau titik strategis bagi perbaikan kinerja akan tetapi masuknya *network* sangat penting untuk mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosial lain.

World Bank dalam Keban,(2008) lebih fokus pada “*capacity building*” dengan beberapa dimensi, yakni: (a) Pengembangan sumber daya manusia, khususnya melalui training, rekrutmen, pemanfaatan dan pemberhentian tenaga kerja profesional, manajerial, dan teknis; (b) Organisasi, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya, dan gaya manajemen; (c) Jaringan kerja interaksi organisasi, yaitu koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi jaringan kerja, dan informasi formal dan informal; (d) Lingkungan organisasi, yaitu aturan dan perundang-undangan yang mengatur pelayanan publik, tanggungjawab, dan kekuasaan antara lembaga, kebijakan yang menghambat tugas-tugas pembangunan, dan dukungan keuangan; (e) Lingkungan keuangan yang luas, yaitu mencakup faktor politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap kinerja. Sementara itu UNDP memfokuskan pengembangan kapasitas pada tiga aspek, yakni: (1) SDM, yakni terkait dengan kualitas SDM dan cara SDM dimanfaatkan, (2) dimensi fisik (modal), yaitu menyangkut peralatan, bahan-bahan yang diperlukan dan gedung; (3) teknologi, yaitu gaya manajemen, fungsi perencanaan, pembuatan keputusan, pengendalian dan evaluasi serta sistem informasi manajemen.

Berkaitan dengan pandangan A.Fiszbein dan World Bank di atas menurut Keban, (2008: 203) *capacity building* sebenarnya berkenaan dengan : 1) strategi menata *input* dan proses dalam mencapai *output* dan *outcome*, serta menata *feed back* untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada tahap berikutnya. Strategi menata *input* berkenaan dengan kemampuan lembaga menyediakan berbagai jenis dan jumlah serta kualitas SDM dan non manusia, seperti keuangan, sarana dan prasarana pendukung organisasi agar siap digunakan bila diperlukan; 2) strategi menata proses berkaitan dengan kemampuan lembaga merancang, memproses dan mengembangkan kebijakan, organisasi dan manajemen; 3) strategi menata *feed back* berkenaan dengan kemampuan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan mempelajari hasil yang telah

dicapai, kelemahan-kelemahan dalam input dan proses serta mencoba melakukan tindakan perbaikan secara nyata setelah melakukan berbagai penyesuaian dengan lingkungan. Itu berarti pemilihan strategi yang tepat dalam pengembangan kapasitas menjadi sangat vital, karena ketidakcermatan memilih strategi akan mengurangi efektivitas, efisiensi dan kualitas menjalankan fungsi-fungsi organisasi.

Sedangkan Rozaki, dkk (2005:108-109) berpendapat bahwa secara esensial kapasitas selalu bekerja pada tiga level yang saling kait mengkait, yakni: (1) kapasitas pada level individu, yaitu selalu bersentuhan dengan bagaimana meningkatkan ketrampilan dan kualitas individu yang terdiri dari uraian pekerjaan, motivasi, sikap kerja; (2) kapasitas di level kelembagaan / organisasi, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan lembaga dengan struktur organisasi, proses-proses kerja dan budaya kerja; (3) kapasitas di level sistem, yaitu bagaimana menetapkan kondisi-kondisi yang memungkinkan dan membatasi pemerintah untuk berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan intern dan di luar organisasi yang terus berubah dari waktu ke waktu.

Dengan demikian arah pengembangan kapasitas sumber daya organisasi desa sudah saatnya mulai difokuskan pada pengembangan kapasitas individu dan organisasi melalui proses pelatihan dan bimbingan yang terprogram dan berkelanjutan dari pemerintah supra desa atau pihak NGO yang peduli dengan masalah pengembangan sumber daya manusia. Singkatnya semua kegiatan memang berawal dari manusia sebagai pengendali dan akhirnya kembali ke manusia sebagai obyek.

## **2.2. Penguatan Kapasitas Organisasi Desa**

Menelaah sejumlah pandangan teoritik dalam konteks penelitian ini setidaknya lebih difokuskan pada penjelasan kerangka konseptual kapasitas organisasi desa yang terkait dengan pengembangan kapasitas SDM baik secara individual maupun organisasi. Karena itu menurut Rozaki, dkk (2005) ada tiga alasan utama mengapa organisasi desa perlu diperkuat, yakni: (1) kapasitas desa memang terbatas dalam menjalankan fungsi regulasi, pelayanan dan pemberdayaan; (2) sejak dulu penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah; (3) kapasitas pemerintah desa merupakan sebuah esensi dan basis otonomi desa. Itu berarti penguatan terhadap kapasitas pemerintah desa sangatlah mendesak sesuai tuntutan global dan regulasi negara. Karena untuk mendorong peningkatan

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa tak bisa diwujudkan kalau tidak didukung oleh suatu sumber daya organisasi desa yang kuat. Menurut Rozaki, dkk (2005) kapasitas organisasi pemerintah desa merupakan sesuatu yang bersifat sistemik yang di dalamnya terkandung proses interaksi antara pemerintah desa, BPD, warga desa dan lembaga-lembaga sosial lain di desa.

Kapasitas organisasi desa tidak bisa dipandang dari perspektif pekerjaan pemerintah desa dalam menjalankan peraturan desa dan peraturan dari pemerintah tingkat atas semata. Tetapi harus dilihat juga dari aspek dinamika kelembagaan, yaitu interaksi antar elemen yang ada di desa terkait kepentingan warga desa yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan strategi untuk mencapainya. Karena itu penguatan kapasitas organisasi pemerintah desa harus mampu menjadi pilar utama bagi penguatan elemen sosial lain di desa.

Menurut Milen dalam Rozaki, dkk, (2005:115-116) penguatan kapasitas organisasi di level desa adalah sebuah proses berkelanjutan, dimana individu, kelompok, organisasi dan masyarakat meningkatkan kemampuannya untuk: (1) menjalankan fungsi pokok, memecahkan masalah dan mencapai tujuan organisasi; (2) memahami dan menghubungkan kebutuhan pengembangan mereka dalam konteks yang lebih luas dengan cara yang berkelanjutan. Lebih lanjut Milen menegaskan bahwa ada sejumlah kapasitas yang perlu dimiliki oleh pemerintah desa yakni: (1) Kapasitas regulatif, kemampuan pemerintah desa merancang dan menetapkan regulasi.; (2) Kapasitas ekstraktif, yaitu kemampuan mengumpulkan, menggerakkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan pemerintah desa dan masyarakatnya; (3) Kapasitas distributif, adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa; (4) Kapasitas responsif, yaitu kepekaan atau daya tanggap pemerintah desa untuk menyerap aspirasi warga desa; (5) Kapasitas jaringan dan Kerjasama, kemampuan pemerintah desa dalam mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Kapasitas atau kapabilitas adalah suatu indikator untuk mengukur kemampuan seseorang atau institusi dalam menjalankan fungsinya. Agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif, maka setidaknya desa perlu memiliki suatu kesanggupan,

keterampilan, pengetahuan dalam mengeksekusi tugas dan fungsi masing-masing dari aparat desa. Kemampuan yang dimaksudkan adalah kesanggupan menampilkan karya-karya yang produktif dan inovatif berdasarkan tugas dan fungsi maupun tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Secara teoritik ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan, *Pertama*, kapasitas regulasi (mengatur), *Kedua* kapasitas ekstraksi. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan mengumpulkan, mengerahkan dan mengoptimalkan aset-aset desa untuk menopang kebutuhan (kepentingan) pemerintah desa dan masyarakat desa, *Ketiga* kapasitas distributif. Kapasitas distributif adalah kemampuan pemerintah desa membagi sumberdaya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa, *Keempat* kapasitas responsif. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk peka atau memiliki daya tanggap terhadap aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis dalam perencanaan kebijakan pembangunan desa, *Kelima* kapasitas jaringan dan kerjasama. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan warga masyarakat desa mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar.

### **2.3. Perencanaan Pembangunan Desa**

Setiap kali melakukan pembangunan, hal paling urgen dan pertama yang mesti dilakukan adalah kegiatan perencanaan. Karena perencanaan merupakan suatu langkah awal yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang baik harus melibatkan peran serta semua elemen terkait dan setidaknya harus mencerminkan visi dan misi dari pemimpinnya. Karena tugas seorang pemimpin mesti memastikan bahwa seluruh rencana pembangunan yang ditetapkan telah mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan mayoritas dan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga hasil pembangunan yang akan dicapai kelak sungguh-sungguh membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat desa secara luas.

Oleh sebab itu E.F Schumacher, (1973) berpandangan bahwa pembangunan masyarakat tidak dimulai dengan barang tetapi dimulai dengan orang. Menurutnya manusia adalah sumber utama dari segala macam kekayaan. Kalau mereka tidak

dilibatkan dan dipermainkan oleh orang yang menyebut dirinya ahli maupun oleh perencana yang arogan maka pembangunan apapun tidak menghasilkan apa-apa.

Secara teoritik pendekatan pembangunan masyarakat dapat dikelompokkan dalam dua aliran besar, yakni pembangunan yang berorientasi pada produksi dan pembangunan yang berorientasi pada rakyat, (Nasdian, 2014:24). Dan sejatinya trend pendekatan pembangunan dewasa ini lebih cenderung pada pembangunan masyarakat sebagaimana yang digagas oleh Amartya Sen, Dudley Seers, Paul Streeten, M. ul Haq, J. Friedman, dan lain-lainnya, (Martinussen, 1997).

Pendekatan pembangunan seperti ini selalu menitik beratkan pada pentingnya partisipasi masyarakat dan berorientasi kebutuhan, keswadayaan, peningkatan kesadaran kritis, perencanaan dari bawah dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Robinson Tarigan, (2009) perencanaan pembangunan wilayah, juga mengemukakan dengan pelibatan tersebut maka perencanaan menjadi semakin baik, aspirasi masyarakat semakin tertampung sehingga tujuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa semakin baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sebab pembangunan pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan menuju kesejahteraan masyarakat desa. Dari uraian tersebut sangatlah jelas bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan di masa depan akan semakin menantang dan dinamis sebab kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis sehingga diharapkan hasil pembangunan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu menurut Arif, (2006:149-150) tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sudah selayaknya masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan itu.

Sedangkan menurut Siagian, (2008) pembangunan adalah suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa. Dengan demikian dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, serta dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari

pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, sejati sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa yaitu bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan pandangan sebelumnya menurut Wahyudi Supeno, (2011) perencanaan desa terpadu, diartikan sebagai proses perencanaan pembangunan desa yang berbasis pada suatu panduan atau model penggalian masalah, potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Model perencanaan pembangunan desa seperti diungkapkan Supeno sejatinya cenderung bertumpu pada model pembangunan partisipatif atau secara terpadu menyertakan tanggung jawab banyak pihak. Model ini selalu mensyaratkan pelibatan secara luas semua elemen masyarakat di desa. Hal itu berarti setiap pembangunan yang direncanakan di desa harus berawal dan dimulai dari level atau institusi yang paling bawah dan secara berjenjang perencanaan akan dimulai dari penggalian masalah dan usulan di tingkat rukun tetangga (RT), Dusun dan kemudian berakhir di Desa.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa semua aspirasi yang tumbuh dan berkembang di desa dapat terserap lebih banyak dalam proses perencanaan pembangunan desa. Sebab diyakini bahwa apabila proses pengelolaan pembangunan di desa telah dilakukan secara bersama-sama melalui mekanisme musyawarah-mufakat dan semangat gotong royong, maka setidaknya program pembangunan yang telah ditetapkan akan menjadi tanggung jawab bersama dan mesti didukung dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab melalui langkah dan tindakan nyata bersama.

Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif secara substantif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghadirkan aspirasinya dalam setiap forum musyawarah dan sekaligus dapat memperjuangkannya dalam suatu agenda kebijakan dan program pembangunan desa. Selain itu melalui pelibatan masyarakat secara intens dalam berbagai forum di desa akan lebih meningkatkan keberdayaan dan daya kritisnya dalam mencermati setiap proses kebijakan dan program-program pembangunan yang digulirkan di desa.

Apabila masyarakat desa sudah berdaya, maka setidaknya suatu upaya terencana untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam kehidupan berdesa, berbangsa dan bernegara dapat dicapai. Sehingga roda pemerintahan dan pembangunan di desa dengan sendirinya mulai dapat dikontrol dengan baik oleh masyarakat desa sendiri termasuk dapat mencegah dan mengendalikan secara efektif langkah dan tindakan pemerintah desa yang dianggap dapat merugikan masyarakat desa.

Secara normatif disain perencanaan pembangunan desa yang dilakukan selama ini telah melalui proses berjenjang yaitu berawal dari usulan rencana pembangunan pada level yang paling bawah dengan melibatkan semua elemen masyarakat di desa, yakni dimulai dari tingkat RT, Dusun dan terakhir dibawah naik ke tingkat Desa. Sedangkan perencanaan pembangunan di tingkat Desa ada dua jenjang yang mesti dilewati, yakni (1) Kepala desa berkewajiban menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) 6 tahunan setelah terpilih dan dilantik menjadi kepala desa; (2) Setelah RPJMDes ditetapkan selanjutnya disusun rencana pembangunan tahunan desa (RPTD) atau rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes.

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Studi deskriptif bertujuan untuk melakukan pengukuran yang cermat mengenai gejala sosial tertentu (Singarimbun, 2001:4). Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa besar kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa, di Desa Oben, Kabupaten Kupang

Sedangkan data primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan kombinasi sejumlah teknik, antara lain: teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi data lapangan. Sedangkan menurut Moleong, (2009:11) bahwa penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya di dalam perencanaan pembangunan selalu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, dalam arti harus memiliki kualitas teknokratis yang memadai agar dapat mendisain konsep perencanaan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.

Meskipun ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan, tetapi salah satu yang hendak dikaji dalam konteks penelitian ini adalah kapasitas aparatur pemerintah desa terutama tingkat pendidikan dan pengalamannya dalam menyusun rencana dan program-program pembangunan. Kapasitas aparatur desa tentu sangat dibutuhkan untuk mendisain sebuah model perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif agar dapat menjawab beragam masalah dan kebutuhan masyarakat desa.

Sebab itu bila tingkat pendidikan perangkat desa masih relatif rendah, maka akan mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya terutama dibidang administrasi pembangunan dan pemberdayaan. Dengan semakin meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam proses perencanaan pembangunan maka akan ada implikasi positif terhadap aktivitas dan substansi yang dihasilkan dari proses perencanaan pembangunan desa itu.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis sejumlah aspek yang terkait dengan seberapa besar kapasitas pemerintah desa merencanakan pembangunan desa, di Desa Oben, Kabupaten Kupang. Karena itu pembahasan akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu: (1) Kapasitas ekstraksi pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, (2) Kapasitas responsif pemerintah desa dalam pembangunan, (3) Kapasitas jaringan dan kerjasama pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa.

#### **4.1. Kapasitas Ekstraksi**

Kapasitas ekstraksi yaitu kemampuan pemerintah desa merencanakan pembangunan desa dengan memanfaatkan secara optimal aset-aset desa yang dimiliki seperti tanah desa, jalan desa, kantor desa, balai desa, bumdes, sarana irigasi dan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

Hal yang lebih teknis dalam menunjang peningkatan perwujudan pembangunan menuju perbaikan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah desa dengan cara merencanakan pemanfaatan aset-aset desa untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi bagian penting yang harus mendapat perhatian serius sesuai cita-cita perjuangan otonomi dan dasar reformasi bidang pemerintahan dan pembangunan di segala bidang kehidupan

Temuan lapangan membuktikan bahwa pemerintah desa dengan segala kemampuan yang dimiliki telah merencanakan pemanfaatan aset-aset desa, walaupun dalam kenyataan belum cukup maksimal. Karena pemanfaatannya masih hanya sebatas pada fungsi fisik bangunan dari aset tersebut semata.

Berkaitan dengan itu Bapak Yabes Abjena selaku Kepala Desa Oben mengatakan dalam perencanaan pemanfaatan aset-aset desa seperti kantor desa dan balai desa untuk pelayanan publik sudah tersedia, sehingga telah memudahkan masyarakat setempat dalam memenuhi setiap kepentingan yang mereka butuhkan. Karena ditunjang oleh alat-alat elektronik seperti komputer, alat print, mesin fotocopy, maka pelayanan administrasi dilayani dengan cepat. Hanya ada beberapa saja yang belum ada seperti jaringan wifi, sehingga akses informasi tentang sumber daya desa tidak bisa dilakukan secara cepat melalui jejaring online. Karena itu desa Oben pun belum mempunyai *website* desa. Sedangkan untuk balai desa, dulu belum ada lahan yang bisa digunakan untuk membangunnya tetapi sekarang dengan adanya dana desa masalah lokasi dan pembangunan balai desa sudah teratasi.

Lebih lanjut dikatakan Kepala desa bahwa setiap ada pertemuan mereka selalu menggunakan kantor desa, dan untuk dusun 3 dan dusun 4 jaraknya cukup jauh dan sebagian warga berjalan kaki ke kantor desa. Oleh karena itu pada beberapa tahun sebelumnya warga desa dikedua dusun ini jarang menghadiri pertemuan, melainkan kepala dusunnya saja yang mewakili. Tetapi setelah ada dana desa, jalan antar dusun mulai diperbaiki sehingga isolasi fisik atau hambatan jarak dan kerusakan jalan kini sudah teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di depan terungkap bahwa pemanfaatan aset-aset desa sudah didukung dengan fasilitas-fasilitas kantor desa yang

cukup memadai sehingga aparat desa yang bertugas dapat melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Walaupun optimalisasi pemanfaatan atas fasilitas publik untuk kegiatan masyarakat lain, seperti kegiatan forum warga, kelompok petani dan para ibu serta para pemuda belum kelihatan.

Sedangkan aset publik lain seperti tana desa dan embung desa yang dijadikan sebagai sarana pengembangan hasil pertanian melalui pengairan irigasi dan penggunaan air bersih untuk kebutuhan warga belum direncanakan dengan baik. Akibatnya sebagian warga masih merasakan kekurangan pangan dan kesulitan mengakses air bersih, apa lagi ketika memasuki musim kemarau. Sejumlah warga menuturkan bahwa setiap tahun selalu saja ada keluhan dari warga desa tentang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, air bersih, namun sampai saat ini belum ada perencanaan yang komprehensif dari pemerintah desa. Pada hal masih banyak lahan tidur yang belum dioptimalkan dan embung desa itu sudah dibangun sejak tiga tahun yang lalu tepatnya tahun 2018 tetapi belum memberikan efek yang signifikan bagi kehidupan masyarakat.

Apabila pemerintah desa memahami esensi pelayanan publik dan mau mendengarkan aspirasi warga desa, tentunya pelayanan publik terkait kebutuhan dasar warga terhadap kebutuhan pokok dan air bersih sudah lama teratasi sejak dibangunnya embung desa. Pada hal pelayanan publik seharusnya menjadi prioritas pembangunan dan tak bisa ditawar-tawar karena terkait dengan hajat hidup manusia secara langsung, apalagi yang berhubungan dengan pangan dan penyediaan air bersih. Tentu selalu terkait dengan tingkat dan kualitas kesejahteraan hidup manusia sekaligus sebagai hak dasar dari setiap warga desa yang harus dipenuhi oleh pemerintah di semua level.

Tugas dan kewajiban para pejabat publik di level manapun adalah sama, yakni menghadirkan layanan terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan warga desa. Karena itu kapasitas pemerintah desa dalam kegiatan perencanaan menjadi sesuatu yang mutlak dipenuhi.

Menurut Kepala desa, walaupun embung desa sudah dibangun sejak tahun 2018, namun warga desa masih merasa kekurangan air bersih, saat ini masyarakat

hanya menggunakan embung untuk kebutuhan irigasi semata. Sedangkan kebutuhan air bersih masih diperoleh dari beberapa sumber mata air yang ada di wilayah desa Oben sendiri, meskipun cukup jauh jaraknya dari pemukiman penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan diketahui bahwa sebenarnya desa Oben tidak perlu mengalami kekurangan pasokan air bersih karena memiliki sumber mata air sendiri, sayangnya pemerintah desa tidak merencanakan anggaran pemasangan jaringan pipa untuk disalurkan ke pemukiman penduduk bagi kebutuhan rumah tangga atau MCK yang lebih sehat.

Sedangkan kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan pemanfaatan aset SDM untuk kepentingan pembangunan desa juga ditemukan belum maksimal. Pada hal sumber daya manusia desa merupakan kunci utama untuk menentukan maju mundurnya pembangunan di desa.

Wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, diketahui bahwa sebenarnya untuk menggerakkan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan tidaklah sulit apabila pemerintah desa memahami apa yang menjadi kebutuhan, kehendak dan masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya. Karena itu pendekatan yang tepat bagi seorang pemimpin akan sangat diperlukan agar dapat mempengaruhi pelibatan warga desanya. Artinya keikutsertaan dalam suatu kegiatan pembangunan bukan timbul begitu saja akan tetapi karena adanya faktor internal yakni kesadaran masyarakat itu sendiri karena merasa pentingnya pembangunan bagi dirinya dan faktor eksternal dari diri seorang pemimpin dalam memahami kebutuhan dan masalah warga desanya.

Sejauh ini kapasitas SDM di desa Oben masih terbilang rendah, sayangnya belum ada atau sangat minim perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan untuk perangkat desa dan warga desa sendiri. Akibatnya sejumlah perangkat desa dan sebagian masyarakat desa yang rendah tingkat pendidikan tak bisa berpikir bagaimana caranya merencanakan anggaran untuk mengatasi kekurangan pangan dan kecukupan air bersih dari sumber mata air yang ada di desanya.

Tingkat pendidikan masyarakatpun sangat mempengaruhi warga desa untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Karena menurut sejumlah warga yang ditemui di kediamannya masing-masing terungkap nada yang hampir sama, bahwa anggaran dana desa-kan datangnya dari pemerintah, jadi dana desa itu sebenarnya adalah milik

pemerintah, karena itu silakan saja mereka menggunakannya untuk pembangunan desa, sebagai warga desa kita ikut saja apa maunya pemerintah desa.

Ungkapan seperti ini dapat dimaklumi karena minimnya pengetahuan masyarakat desa tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang warga desa dan sekaligus sebagai warga suatu bangsa dan Negara. Itu sebabnya tak sedikit warga desa yang hadir dalam proses pelaksanaan pembangunan bukan karena kesadarannya yang tinggi sebagai warga desa, melainkan hanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan lingkungan sosialnya dan sebagian malah ikut-ikutan saja tanpa tahu dampak baik dari pembangunan desa itu sendiri.

Pada hal sesungguhnya sebagai orang desa dan sekaligus warga Negara Indonesia, ia sebenarnya telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak setiap tahun kepada pemerintah/negara, dan karenanya berhak pula menikmati anggaran yang diberikan Negara melalui pemerintah desa untuk memenuhi kepentingannya sebagai warga desa.

#### **4.2.Kapasitas Responsif**

Kapasitas responsif yaitu kemampuan pemerintah desa menanggapi aspirasi atau kebutuhan warga masyarakat melalui perencanaan program pembangunan desa. Aspirasi masyarakat di desa, baik yang sifatnya keinginan maupun yang menjadi kebutuhan, sudah sering disampaikan baik melalui forum-forum informal maupun di forum resmi seperti di tingkat RT, Musdus maupun dalam Musrenbangdes, sehingga telah menjadi kewajiban dari pemerintah desa untuk menindaklanjutinya. Dalam mengambil langkah tindak lanjut pemerintah desa harus bertindak cermat dan bijaksana dalam menentukan skala prioritas karena tidak semua aspirasi bisa dimasukkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan desa.

Melalui wawancara dengan sejumlah informan diketahui bahwa sebenarnya melalui pertemuan di tingkat RT dan Dusun sejumlah masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya baik dalam bentuk kritik, usulan, pendapat atau gagasannya. Dan pihak pemerintah desa sesungguhnya telah mengetahui dan mendengarkan aspirasi masyarakat tersebut, namun ketika aspirasi itu dibawa naik ke forum musrenbangdes, aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut banyak yang hilang.

Dalam arti aspirasi masyarakat yang muncul di tingkat RT dan Dusun sebagian besar tidak terakomodasi dalam kebijakan dan program prioritas pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sesungguhnya kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa ketika menyusun perencanaan pembangunan desa. Sebab banyak aspirasi yang muncul pada forum RT dan Dusun kemudian hilang dalam perjalanan menuju ke forum musrenbangdes. Artinya yang lebih banyak direspon dalam forum tersebut adalah kepentingan para elit di desa dan bukan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun tingkat pengetahuan dan pendidikan warga masih relatif rendah tetapi mereka sebenarnya bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik sesuai tingkat pemahaman mereka tanpa tahu bahwa sebenarnya masih ada satu forum lagi yang mesti dilewati untuk menggolkan aspirasi mereka, yakni di tingkat musrenbangdes.

Akibatnya aspirasi yang disampaikan tersebut hanya sekedar formalitas semata karena gagal diperjuangkan di forum musrenbangdes menjadi kebijakan dan program prioritas di desa yang kelak dapat dirasakan dan bermanfaat bagi kehidupannya.

#### **4.3. Kapasitas Jaringan dan Kerjasama**

Kapasitas Jaringan dan Kerjasama dalam perencanaan yaitu kemampuan pemerintah desa dan warga masyarakat desa merencanakan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti melibatkan kerjasama dengan desa tetangga, organisasi masyarakat sipil dan pihak perguruan tinggi melalui kegiatan pendampingan, Magang, KKN dan praktik kerja lapangan.

Apabila ingin mendorong akselerasi pembangunan desa menuju kemajuan dan kemandirian desa, maka pemerintah desa bersama organisasi sosial lain di desa harus mulai membuka diri untuk menjalin kerja sama dan bersinergi lebih erat dan intens dengan berbagai pihak eksternal. Karena hubungan kerjasama desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa terelakkan tanpa keterlibatan pihak lain.

Oleh karena itu pemerintah desa perlu menyiapkan kapasitasnya baik secara individual maupun organisasi melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan mesti sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBDes jauh-jauh sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Albertus Neno selaku Sekretaris desa Oben diketahui bahwa selama ini pemerintah desa selalu menjaring kerja sama dengan pihak luar demi membangun desa Oben untuk kedepannya yang lebih baik. Salah satu jaringan kerja sama yang sering dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan menerima setiap universitas yang ingin melakukan kegiatan KKN di desa. Sebab dengan adanya kegiatan KKN tersebut pemerintah desa juga dapat terbantu dengan program kerja yang dibawah oleh mahasiswa. Contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu diantaranya ada kegiatan berupa sosialisasi, kegiatan fisik, membantu pelayanan di kantor desa dan lain-lain.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemampuan membangun jejaring dan kerjasama pemerintah desa dengan pihak eksternal masih sangat terbatas dan sebenarnya kurang berdampak signifikan pada pembangunan masyarakat desa. Karena hanya mengandalkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi melalui kegiatan KKN yang durasi waktunya sangat terbatas dan tak terencana dengan baik sehingga lebih terkesan hanya bersifat formalitas.

Pada hal yang paling urgen dalam kegiatan kerjasama desa itu adalah kerjasama dalam banyak aspek dan bersifat jangka panjang. Misalnya merencanakan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi sebagai pendamping desa untuk pelatihan penyusunan ranperdes, pengembangan Bumdes, penataan administrasi desa dan penyusunan RPJMDes dan RKPDDes secara terprogram dan berkelanjutan.

## **V. PENUTUP**

Secara umum model perencanaan pembangunan desa belum menitikberatkan pada pelibatan masyarakat luas karena terbukti belum cukup menjawab semua persoalan dan kebutuhan mayoritas warga desa. Hal itu disebabkan karena rendahnya kapasitas ekstraksi dari pemerintah desa, dalam arti pemerintahn desa kurang mampu merencanakan pemanfaat atas aset-aset desa yang dimilikinya secara optimal untuk kesejahteraan warga desa.

Akibatnya penggunaan aset-aset desa masih hanya terbatas pada pelayanan administrasi semata. Pada hal diharapkan pemanfaatannya bisa lebih luas menjangkau kepentingan berbagai elemen masyarakat lain untuk penguatan kapasitasnya, seperti kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok ibu dan anak. Sehingga kelak mereka

memiliki kemampuan sendiri dan kesadaran tinggi untuk memperjuangkan kepentingannya dalam berbagai forum resmi di desa, seperti forum musyawarah desa dan musrenbangdes agar dapat menghasilkan berbagai kebijakan dan program-program nyata bagi masyarakat desa.

Demikian juga halnya dengan kapasitas responsif dalam menanggapi berbagai keluhan warga desa. Pemerintah desa dinilai belum maksimal bahkan cenderung mengabaikan aspirasi nyata di tingkat paling bawah seperti aspirasi masyarakat di tingkat RT dan Dusun. Karena dalam kenyataan banyak aspirasi masyarakat di tingkat RT dan Dusun yang kerap disampaikan tetapi kemudian hilang begitu saja ketika naik ke tingkat forum musrenbangdes.

Walaupun pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan cukup aktif dalam menerima dan menanggapi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, namun terkesan hanya formalitas belaka, karena dalam penyusunan program lebih banyak mengakomodasi kepentingan para elit di desa.

Sedangkan terkait kapasitas jaringan dan kerjasama sudah diupayakan oleh pemerintah desa tetapi masih bersifat terbatas dan tak memberikan efek signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa secara menyeluruh, melainkan hanya menerima kegiatan KKN mahasiswa di desa yang bersifat sementara waktu tanpa perencanaan dan program kerjasama yang berkelanjutan.

Dengan demikian pemerintah desa perlu lebih banyak melibatkan elemen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan secara niscaya meningkatkan kapasitasnya baik pada aspek ekstraksi, responsif dan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak secara terprogram dan berkelanjutan agar kelak dapat mendisain suatu perencanaan pembangunan desa yang lebih baik. Dalam arti dapat mengoptimal semua sumber daya desa, lebih responsif dan berkualitas agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Eko, Sutoro, dan Abdur Rozaki, eds, (2005) : *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Nasdian, Fredian Tonny, (2014), *Pembangunan Masyarakat*, Buku Obor, Jakarta
- Milen, Aneli, (2004), *Pengembangan Dasar Kapasitas*, Pembaruan , Yogyakarta
- Moleong, Lexy J., (2009) *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja, Jakarta.
- Martinussen, John, (1997) *Society, State and Market: A Guide to Competing Theories of Development*, London, Zed books
- Rosaki, Abdur, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004
- Schumacher, E.F, (1973), *Small is Beautiful*, LP3ES, terjemahan: S.Supomo, Jakarta
- Siagian, Sondang P, (2008) *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi, Penyunting, (1982) *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Supeno, Wahyudin, (2011) *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Revisi*, Read, Banda Aceh.
- Tarigan, Robinson (2009). *Perencanaan Pembangunan wilayah, edisi revisi*. Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Yeremias T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta, 2008
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa